



Konsep Ideal Lanskap Linguistik di Ibu Kota Negara Baru (*Ideal Concept of Linguistic Landscape in New State Capital*)

Saefu Zaman^{a,1}, Anis Rahmawati^{a,2}, Kurniawan Kurniawan^{a,3*}

^aBadan Riset dan Inovasi Nasional

¹saefu.zaman@brin.go.id; ²anis.rahmawati@brin.go.id; ³kurn025@brin.go.id

*Corresponding Author

Article info

A B S T R A C T

Article history:

Received: 12-02-2023

Revised : 11-06-2023

Accepted: 19-07-2023

As the center of activity and the face of the country, the new national capital (IKN) must show national identity, one of which can be demonstrated by its linguistic landscape. This study aims to project a new national capital (IKN) linguistic landscape (LL) that highlights national identity. This research is a literature study with a qualitative descriptive method. The data of this research are studies of the linguistic landscape, regulations on language use, and data on the linguistic landscape in Jakarta as a reflection of the linguistic landscape in the new IKN. The results of the study show that in order to achieve the ideal linguistic landscape of the IKN with an Indonesian identity, the linguistic landscape in the new IKN must be principled in prioritizing the Indonesian language. To support the functions of the linguistic landscape, namely information and symbolic functions, foreign languages and/or regional languages can be used to accompany or clarify Indonesian. To achieve this, synergy is needed between the government, public area managers, and business actors. The implication of applying the ideal concept of a linguistic landscape in IKN is the establishment of the IKN area which is a symbol of the state and has an Indonesian identity.

Keywords:

identity

linguistic landscape

national capital (IKN)

Sebagai pusat kegiatan dan wajah negara, ibu kota negara (IKN) baru harus memperlihatkan identitas kenegaraan, yang salah satunya bisa ditunjukkan dengan lanskap linguistiknya. Penelitian ini bertujuan untuk memproyeksikan lanskap linguistik (LL) ibu kota negara (IKN) baru yang menonjolkan identitas nasional. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah kajian-kajian lanskap linguistik, regulasi penggunaan bahasa, dan data lanskap linguistik di Jakarta sebagai refleksi lanskap linguistik di IKN baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai lanskap linguistik ideal IKN yang beridentitas keindonesiaan, lanskap linguistik di IKN baru harus berprinsip pada pengutamaan bahasa Indonesia. Untuk menunjang fungsi lanskap linguistik yakni fungsi informasi dan simbolik, bahasa asing dan/atau bahasa daerah dapat digunakan untuk mendampingi atau memperjelas bahasa Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergisitas antara pemerintah, pengelola kawasan publik, dan para pelaku usaha. Implikasi penerapan konsep ideal lanskap linguistik di IKN adalah terbangunnya kawasan IKN yang menjadi simbol negara dan beridentitas keindonesiaan.



PENDAHULUAN

Era globalisasi dengan teknologi informasi yang semakin maju saat ini terkadang memunculkan dilematis dalam menyikapi bahasa. Pada satu sisi, bahasa internasional menjadi tuntutan zaman, sisi lain bahasa nasional wajib untuk dipertahankan. Di tengah masyarakat yang semakin “keminggris”, upaya pengutamaan bahasa negara menjadi hal yang vital dan mendesak. Masyarakat diharapkan tetap memperhatikan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sekaligus bahasa nasional. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi sebagai identitas dan jati diri serta pemersatu bangsa (Ridwan, 2018). Salah satunya dengan berperilaku dan bersikap positif terhadap bahasa Indonesia (Dewantara dkk., 2019). Dasar pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik ialah UUD 1945 Pasal 36 yang lahir pada 1945 (Itaristanti, 2020) dan Sumpah Pemuda 1928 melalui Kongres Pemuda II tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia (Fitriati & Rata, 2020; Melati, 2018; Sudaryanto dkk., 2019).

Bahasa yang digunakan secara tertulis di ruang publik dapat menunjukkan identitas yang dimiliki oleh suatu bangsa (Taylor-Leech, 2012; Yan, 2019). Bahasa ruang publik utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan penamaan lembaga, fasilitas umum, dan iklan sebagai penunjuk atau petanda identitas pemiliknya (Lu dkk., 2020; Nash, 2016). Maka dari itu, ruang publik di Indonesia harus selalu dibina agar bahasa Indonesia digunakan secara taat asas. Salah satu caranya adalah dengan memberikan contoh atau teladan penggunaan bahasa negara yang baik, khususnya di kawasan-kawasan vital dan pemerintahan. Masyarakat masih belum setia dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dari penggunaan bahasa di ruang publik yang sebagian besar didominasi bahasa Inggris (Arditama, 2016; Hendrastuti, 2015).

Banyaknya kasus penggunaan bahasa asing di ruang publik Nida (2021); Wulansari (2020) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan vitalnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu dan jati diri bangsa perlu ditingkatkan. Upaya penting yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kawasan dengan lanskap linguistik yang mengutamakan bahasa Indonesia. Kawasan yang strategis sebagai teladan penggunaan bahasa di ruang publik adalah kawasan ibu kota negara (IKN). IKN adalah wajah dan simbol negara. Berpijak dari dasar pemikiran inilah, diperlukan sebuah program prioritas berupa membangun kawasan praktik baik pengutamaan bahasa negara di ruang publik IKN. Kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia bisa lebih bermartabat di negerinya sendiri. Hal tersebut pun sejalan dengan konsep awal dibangunnya IKN. Dalam Perpres No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dijelaskan bahwa Ibu Kota Negara mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol identitas nasional untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara, serta gambaran masa depan bangsa Indonesia (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, 2022. Salah satunya dibangun dengan lanskap linguistik (LL) yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Berdasarkan permasalahan kebahasaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memproyeksikan LL yang ideal di IKN.



Penelitian LL sudah banyak dilakukan untuk mendeskripsikan kondisi lanskap linguistik di suatu daerah dan kawasan (Al-Athwary, 2022; Amin & Zarrinabadi, 2022). Penelitian ini memiliki kebaruan sebagai penelitian pertama untuk mengajukan konsep ideal LL di IKN baru yang saat ini sedang dibangun di Kalimantan. Penelitian ini penting dan bermanfaat karena dapat dijadikan sebagai pedoman atau sumber kajian ilmiah dalam membangun identitas keindonesiaan. Hal tersebut akan berimplikasi pada terbangunnya kawasan IKN yang menjadi simbol negara dan beridentitas keindonesiaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data secara deskriptif, baik lisan maupun tulis, untuk melihat fenomena yang berkembang atau ada di masyarakat tanpa dilihat benar atau salah serta disajikan secara sistematis, faktual, dan akurat (Rochmansyah dkk., 2022; Moeloeng, 2016.). Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, majalah, hasil penelitian yang relevan sebelumnya, serta referensi lainnya untuk mengonstruksi landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Data lapangan yang digunakan adalah data LL di DKI Jakarta. Data di wilayah ini sebagai refleksi penggunaan bahasa di ruang publik di ibu kota negara saat ini dan dijadikan sebagai dasar proyeksi penggunaan bahasa negara di IKN baru. Data pustaka diperoleh dengan mengumpulkan buku referensi dari berbagai sumber dan hasil-hasil penelitian LL dari berbagai situs jurnal nasional dan internasional. Data lapangan diperoleh dengan mengambil foto LL di wilayah DKI Jakarta pada November—Desember 2022. Analisis data dilakukan dengan pendekatan LL. Analisis dilakukan untuk menjelaskan dua fungsi LL di wilayah IKN: fungsi informasi dan fungsi simbolis. Hasil analisis data dikembangkan untuk menciptakan konsep ideal LL kawasan IKN yang beridentitas keindonesiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Bahasa

Perencanaan bahasa (*language planning*) adalah bagian dari kebijakan bahasa (*language policy*). Ihwal perencanaan bahasa tersebut juga tidak lepas dari amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pengutamaan bahasa negara. Tiga komponen dalam kebijakan bahasa, yaitu (1) praktik berbahasa yang ada, (2) ideologi atau ketentuan bahasa yang baik dan benar, dan (3) upaya memengaruhi praktik berbahasa, yang mencakup intervensi, perencanaan, dan manajemen bahasa (Spolsky, 2004). Istilah yang digunakan Spolsky adalah pengelolaan bahasa (*language management*). Dalam konsep pengelolaan bahasa tersebut, teori kebijakan bahasa bertujuan untuk menjelaskan pilihan bahasa atau berbangsa oleh penutur individu berdasarkan pola yang telah diatur pemerintah dan diakui oleh komunitas bahasa.

Perencanaan bahasa di Indonesia dinilai telah mengikuti alur yang semestinya dilewati sehingga dapat dikatakan menuai keberhasilan (Sudrama & Yadnya, 2015). Berikut ini beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia



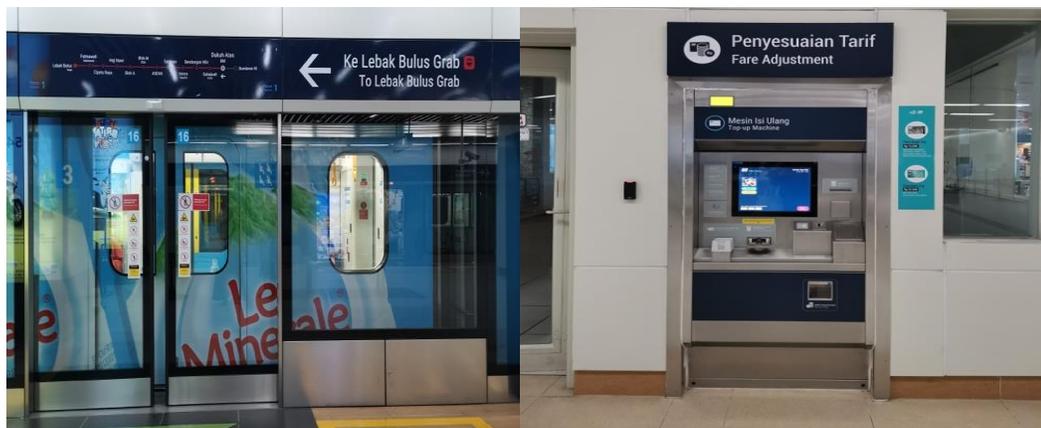
sebagai implementasi perencanaan bahasa Indonesia: (1) penetapan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa nasional pemersatu bangsa, (2) kodifikasi berupa penyusunan dan penerbitan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia dan buku tata bahasa baku Indonesia serta pedoman-pedoman terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, (3) pendidikan bagi calon guru bahasa Indonesia, (4) pengajaran bahasa Indonesia di semua level pendidikan di Indonesia, (5) penyebarluasan bahasa melalui karya sastra, (6) perancangan dan pelaksanaan ujian kemahiran bahasa Indonesia (UKBI), (7) penerjemahan karya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, (8) pengembangan bahasa melalui seminar bahasa nasional, serta (9) pemodernan bahasa Indonesia sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna bahasa di berbagai bidang, terutama industri, perdagangan, dan teknologi. Semua itu dilanjutkan dengan pendidikan dan pembinaan bahasa Indonesia secara terus-menerus, di antaranya dengan meningkatkan literasi bahasa Indonesia, mengampanyekan kamus dan buku tata bahasa baku bahasa Indonesia serta pedoman istilah baku bahasa Indonesia, membudayakan dan menyebarluaskan hasil penelitian bahasa Indonesia, serta melakukan pengutamaan bahasa negara di ruang publik (Ibrahim & Mayani, 2018; Ridlo dkk., 2019).

Perencanaan bahasa di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Sudaryanto dkk, 2019). Manajer bahasa dalam konteks Indonesia adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). Badan Bahasa melaksanakan tugas perencanaan bahasa yang meliputi pengembangan, pembinaan, pelindungan, dan pemberdayaan bahasa dan sastra Indonesia. Saat ini, perencanaan bahasa di Indonesia berbasis diglosia-triglosia (Ibrahim & Mayani, 2018). Konsep tersebut didasarkan pada kondisi Indonesia yang terdiri atas pusparagam situasi kebahasaan. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sejak 1991 hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa bahasa daerah (tidak termasuk dialek dan subdialek) yang telah diidentifikasi dan divalidasi berjumlah 718 bahasa dari 2.560 daerah pengamatan. Kondisi ini tentunya membuat perencanaan bahasa harus mempertimbangkan (1) situasi kebahasaan dan sifat-pola-arah mobilitas sosial antaretnik dan antarwarga sekawasan dan (2) perbedaan situasi kebahasaan di Indonesia (Cohn & Ravindranath, 2014; Yamin dkk., 2020). Misalnya, perencanaan bahasa di kawasan Timur berbeda dengan perencanaan bahasa di kawasan Barat Indonesia.

Jika menilik konsep pengembangan kawasan IKN yang dirancang oleh Bappenas, kawasan IKN akan dibangun dengan konsep kota hutan, kota spons, dan kota cerdas. Untuk mewujudkan konsep-konsep tersebut, tentunya dibutuhkan perencanaan tata kota, termasuk penataan ruang publik dari sudut pandang perencanaan bahasa. Konsep kota cerdas telah dipertimbangkan sebagai elemen menyeluruh dalam menegaskan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia yang dinamis, inklusif, didukung oleh masyarakat, serta siap menghadapi masa depan dan terhubung. Komponen kota cerdas mengidentifikasi elemen nilai tambah digital



atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan (Hariati & Saputri, 2022). Rancangan kota cerdas (*smart city*) di kawasan IKN dapat menjadi dasar kebijakan perencanaan bahasa. Misalnya, penggunaan bahasa Inggris sebagai pendamping bahasa Indonesia. Harmonisasi bahasa negara dan bahasa asing sebagai pendamping dapat ditemui di ruang publik area stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) yang awalnya bernama *Mass Rapid Transit*. MRT merupakan produk atau hasil dari perencanaan bahasa yang diimplementasikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Selain penamaan dalam bahasa Indonesia, pengutamaan bahasa negara yang didukung oleh bahasa asing juga tampak pada ruang publik area stasiun MRT seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik Stasiun MRT Jakarta

Praktik baik penggunaan bahasa di area stasiun MRT tersebut menunjukkan bahwa bahasa negara yaitu bahasa Indonesia dapat berdiri gagah di negeri sendiri. Bahasa asing yang hadir di ruang publik stasiun MRT berperan sebagai bahasa pendukung untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan yang memerlukan akses bahasa asing. Berdasarkan praktik tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap positif berbahasa dengan mengutamakan bahasa Indonesia bukanlah perkara sulit. Keinginan, keyakinan, dan kebulatan tekad dari semua pihak yang mengambil peran penting dalam implementasi perencanaan bahasa negara adalah hal yang mutlak diperlukan untuk mencapai upaya tersebut.

Lanskap Linguistik: Sebuah Pendekatan Interdisipliner

Lanskap linguistik (LL) adalah pemakaian atau kehadiran bahasa di suatu ruang dan tempat. LL merupakan kajian interdisipliner yang semakin populer (Puzey, 2016). Terdapat gabungan disiplin ilmu dalam kajian ini, yaitu sosiolinguistik, antropologi, sosiologi, dan psikologi. LL dikembangkan pertama kali oleh (Landry & Bourhis, 1997). Konsep LL yang ditawarkan adalah penggunaan bahasa untuk tanda jalan umum, papan reklame, nama jalan dan tempat, nama kedai, serta nama bangunan pemerintah dalam sebuah kelompok daerah, wilayah, atau kota. LL memiliki dua fungsi, yaitu fungsi informasional dan fungsi simbolis (Blommaert, 2013). Pada fungsi informasional, makna penanda membedakan wilayah geografis penduduk yang



memberikan bahasa pada nama tempat itu. Dengan kata lain, bahasa berfungsi sebagai penanda wilayah masyarakat penuturnya dan pembeda dari wilayah penduduk lain. Pada fungsi simbolis, kehadiran atau ketidakhadiran bahasa pada papan jalan berdampak pada perasaan sebagai bagian kelompok itu. Fungsi simbolis juga erat kaitannya dengan keterwakilan identitas sebuah etnis (Léglise & Migge, 2021). Lebih lanjut, dominasi satu bahasa pada tanda-tanda publik terhadap bahasa lain dapat mencerminkan kekuatan dan status relatif dari kelompok bahasa yang bersaing. Kajian tersebut dapat diperluas untuk mengetahui kebijakan aktual negara bagian atau wilayah dan keinginan atau kecenderungan untuk mempromosikan bahasa yang diakui, khususnya dalam pemakaian resmi. Misalnya, rambu-rambu gedung pemerintah (Mitits, 2022; Peck & Banda, 2014).

LL juga menandai entitas bahasa pada marka tertulis di tempat umum, seperti nama jalan, toko, sekolah, taman, dan bangunan tempat masyarakat berkegiatan (Ben-Rafael dkk., 2010). LL menyertakan pembuat marka, yakni pihak pemerintah dan pihak swasta. Pihak pemerintah menginisiasi pembuatan nama jalan, nama tempat, dan petunjuk arah yang bersifat *top-down signs*. Pihak swasta berfokus di belakang marka komersial, seperti papan iklan, nama toko, restoran dan lain-lain yang bersifat *bottom-up signs* (Landry & Bourhis, 1997). Salah satu pembeda kategori di atas ialah kebebasan menggunakan bahasa yang bukan bahasa nasional atau resmi negara pada marka yang dibuat oleh pihak swasta (Landry & Bourhis, 1997).

Ruang publik merupakan arena interaksi sosial manusia dan melakukan serangkaian kegiatan budaya (Goebel, 2014). Bahasa merupakan sarana komunikasi di arena publik. LL sebagai kajian interdisipliner berbagai isu bahasa yang berinteraksi dengan bahasa lain di dalam ruang publik (Puzey, 2016). Konsep LL bersinggungan dengan konsep lain, seperti sosiolinguistik, multilingualisme, kebijakan bahasa, geografi budaya, semiotik, sastra, pendidikan, psikologi sosial, dan studi media (Duizenberg, 2020). LL di kawasan IKN dapat menjadi simbol kekuatan kebijakan bahasa nasional (Gorter, 2013). Selain itu, kajian LL juga dapat berupa penggunaan bahasa di area komersial yang biasanya dipengaruhi oleh tujuan ekonomi (Jing, 2017). LL secara praktik dapat mengungkap ideologi bahasa dan identitas masyarakat lokal dalam kaitannya dengan kebijakan bahasa nasional.

LL juga meneliti dalam membentuk vitalitas bahasa regional Occitan, seperti kata yang terlihat pada rambu jalan (Amos, 2017). Tujuan penelitian itu adalah mengkaji beberapa metode dan mengukur vitalitas Occitan yang menaungi Perancis mengartikan asosiasi nama jalan dan terjemahannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif yang mengacu pada kompleksitas semiotik tanda, penyajian informasi, terjemahan, susunan teks yang lebih spesifik. Penelitian berfokus pada analisis lanskap linguistik yang ditemukan pada tanda dan rambu-rambu di sekitar ruas jalan dalam bahasa Prancis dan Occitan. Hal ini dapat menjadi alternatif pengembangan LL kawasan IKN yang salah satunya difokuskan di rambu jalan utama. Itu akan menjadi objek yang memiliki visibilitas tinggi. Penataan lanskap linguistik di kawasan jalan utama akan menunjukkan vitalitas bahasa negara sebagai bagian dari kebijakan bahasa nasional.

LL merupakan studi pengembangan yang relatif baru dalam bidang



sosiolinguistik dan linguistik terapan. Studi LL ditujukan untuk memberikan gambaran umum tentang pola penggunaan berbagai bahasa di berbagai negara pada bentangan geografik yang lebih luas. Penelitian LL dipromosikan oleh penampilan dan pengembangan teknologi baru yang menyajikan teks di ruang publik dengan meningkatkan globalisasi, proses migrasi, dan kontak internasional. Salah satu isu kebahasaan yang berkaitan dengan lanskap linguistik adalah ihwal hak penamaan (*naming rights*) atau sering disebut komodifikasi pada toponimi. Hak penamaan didefinisikan sebagai proses menjual hak menamai pada tempat secara berkala kepada pihak yang memiliki kapasitas ekonomi memadai (Anestos dkk., 2016). Misalnya, sebuah stadion memberikan kesempatan kepada merek dagang yang ingin menamai stadion tersebut dengan nama produk mereka dengan kompensasi dana yang dapat digunakan oleh pemilik stadion tersebut dengan nama produk mereka dengan kompensasi dana yang dapat digunakan oleh pemilik stadion tersebut untuk perawatan dan tanpa harus membebani masyarakat yang memakainya. Dalam konteks ruang publik di Indonesia, yang terbaru adalah nama sirkuit internasional di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang bernama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ada juga satu kawasan di pusat Jakarta yang bernama BNI City. Kedua contoh tersebut adalah praktik penamaan yang dilakukan oleh BUMN yang belum mengutamakan bahasa negara di ruang publik.

Kajian mengenai lanskap linguistik dan ihwal penamaan tempat di Kota Medan pernah dilakukan oleh (Sahril dkk., 2019). Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan bahasa Indonesia sudah tidak bisa menjadi penguasa tunggal atau tidak mendominasi lanskap linguistik di Kota Medan. Terlihat bahwa bahasa Indonesia berkompetisi/bersaing dengan bahasa Inggris sebagai dampak kekuatan ekonomi. Posisi bahasa Indonesia kemudian termarjinalkan, khususnya pada teks-teks yang diproduksi oleh swasta/individu yang sifatnya lebih beragam dibandingkan dengan teks yang diproduksi oleh pemerintah. Kenyataan tersebut seharusnya disikapi dengan pengawasan penggunaan bahasa yang lebih terstruktur. Pengawasan tidak hanya terbatas pada kekuatan institusional, tetapi juga menyentuh pihak “bawah” yang memegang kendali atas lanskap linguistik di Kota Medan. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai lanskap linguistik dan nama-penamaan tempat di kawasan IKN mutlak perlu dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kawasan kota cerdas yang memiliki citra positif dalam penggunaan bahasa negara sebagai bagian dari kebijakan nasional.

Fenomena lanskap linguistik dan penamaan dalam kerangka identitas kebahasaan di Indonesia menjadi hal menarik untuk dikaji seiring dengan menguatnya kecenderungan pemakaian bahasa Inggris, khususnya di wilayah perkotaan. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari unsur bahasa pada nama yang dikaitkan dengan aspek sosiologi, seperti prestise, latar belakang pendidikan, wawasan yang luas, berjiwa muda, dan ekonomi (Sneddon, 2003). Contoh fenomena dominasi bahasa Inggris ditunjukkan oleh objek pada Gambar 2. Dalam objek-objek bahasa tersebut, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sama sekali tidak dihadirkan. Objek bahasa hanya menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris yang diposisikan secara monolingual. Bahkan, penulisan bahasa Inggris tersebut dibuat sangat mencolok dan



menarik sehingga sangat mudah dibaca. Realitas penggunaan bahasa tersebut dapat mengaburkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang seharusnya hadir di ruang-ruang publik. Kekhawatiran akan hilangnya keinginan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa rupanya tidak hanya terjadi di Indonesia. Sebuah penelitian dilakukan oleh Tran & Hoang (2022) yang bertujuan untuk mempelajari interaksi antara budaya Jepang dan budaya lokal Vietnam melalui papan tanda monolingual, bilingual dan multibahasa di Hò Chí Minh City. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penguatan penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Jepang dinilai dapat memperkaya lanskap linguistik dan menciptakan jejak budaya yang khas. Akan tetapi, dominasi kedua bahasa tersebut terlalu dominan. Lanskap linguistik spesifik dalam penelitian ini menunjukkan jejak budaya khas yang ada di daerah tersebut, menunjukkan adanya campur tangan budaya, khususnya budaya Jepang-Vietnam. Karakteristik budaya Jepang di daerah ini terutama tercermin dalam budaya makanan. Metode mempromosikan produk "gaya Jepang" juga mengalami perubahan interferensi karena dampak dari lingkungan "gaya Vietnam".



Gambar 2. Dominasi Bahasa Inggris di Lanskap Linguistik Perkotaan DKI Jakarta

Persaingan atau kompetisi antarbahasa—lokal dan asing—juga terjadi di Filipina. Ketidaksiuaian antara kebijakan bahasa dan praktik penggunaan bahasa menyebabkan bahasa Inggris menempati ruang dengan lebih dominan karena dianggap memberikan peluang ekonomi yang lebih baik dan didukung oleh kompetensi pemakaian bahasa yang semakin fasih berbahasa Inggris. Kondisi tersebut ditambah



dengan kenyataan bahwa kemungkinan terjadi penghapusan atau pendiskreditan bahasa minoritas untuk mendukung penguatan bahasa nasional. Di Filipina, tingkat heterogenitas linguistik begitu tinggi dengan suhu politik yang tinggi pula (Symaco, 2017).

Sikap loyal masyarakat terhadap bahasa negara merupakan wujud nyata sikap positif berbahasa. Garvin dan Mathiot memerinci tiga sikap positif terhadap bahasa negara, yaitu (1) kesetiaan bahasa (*language loyalty*); (2) kebanggaan bahasa (*language pride*); dan (3) kesadaran akan adanya norma bahasa (*awareness of the norm*) (Astuti, 2019; Wardani dkk., 2020). Kesetiaan bahasa mewujudkan sikap mempertahankan bahasa; kebanggaan bahasa akan sikap mengembangkan dan menggunakan bahasa; dan kesadaran akan adanya norma bahasa mewujudkan sikap menggunakan bahasa dengan cermat, baik, benar, dan santun. Ketiga sikap tersebut adalah modal utama pemertahanan bahasa negara agar tetap eksis dan diutamakan penggunaannya. Sikap positif terhadap bahasa negara dan pengutamaannya membutuhkan panduan praktis dalam penerapannya agar pengutamaan bahasa negara dapat berjalan secara berkelanjutan dan konsisten.

Aspek Hukum dan Aspek Edukasi Masyarakat

Dalam rangka mengejawantahkan amanat Pasal 36 UUD 1945, disusunlah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara. Selanjutnya, sebagai landasan ideologi yang kuat dan sebagai pedoman pelaksanaan yang nyata, peraturan tersebut diturunkan ke dalam (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah. Kewajiban pengutamaan bahasa negara di ruang publik dimunculkan secara gamblang di dalam peraturan-peraturan tersebut, yaitu pada pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 38 ayat 1 dan 2 pada UU Nomor 24 tahun 2009 dan pasal 33 ayat 1, pasal 36 ayat 1, pasal 37 pada Perpres Nomor 63 tahun 2019. Badan Informasi Geospasial/BIG dan Kementerian dalam Negeri juga mengatur penamaan tempat (toponim atau nama rupabumi) yang mengutamakan bahasa negara. Pasal 6 Permendagri Nomor 39 tahun 2008 telah dijelaskan bahwa dalam menamai tempat (yang bersifat alamiah ataupun buatan manusia) perlu mempertimbangkan 8 prinsip: 1) menggunakan aksara Romawi; 2) penggunaan satu nama; 3) pemakaian nama lokal/setempat; 4) tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) menghormati unsur suku, ras, agama, dan golongan; 6) menghindari penamaan orang yang masih hidup; 7) menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah; dan, 8) pembatasan tiga kata saja. Dengan demikian, secara tegas disampaikan bahwasanya bahasa Indonesia mendapatkan tempat prioritas dalam penamaan tempat (Lauder & Lauder, 2015).

Pengutamaan bahasa negara sesuai dengan amanat UUD 1945 memerlukan upaya pembinaan bahasa Indonesia yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 bertujuan meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Kedisiplinan dan keteladanan berbahasa Indonesia perlu dibangun agar masyarakat paham dan sadar akan pentingnya bahasa Indonesia. Salah satu upaya



penanaman kedisiplinan dan keteladanan penggunaan bahasa Indonesia adalah dengan membangun atau menciptakan kawasan yang menjadi teladan penggunaan bahasa bagi masyarakat. Penggunaan bahasa yang dimaksud adalah penggunaan bahasa di ruang publik. Pembentukan kawasan praktik baik pengutamaan bahasa negara di wilayah IKN akan menjadi inovasi yang dapat menjadi motor utama bagi wilayah lain di seluruh Indonesia.

Ruang publik adalah wahana praktik penggunaan dan pengutamaan bahasa, terutama bahasa negara. Penggunaan bahasa negara di ruang publik semestinya merujuk pada pedoman penggunaan bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan tempatnya. Penggunaan bahasa di ruang publik yang tidak baik, tidak benar, dan tidak memartabatkan bahasa Indonesia akan sangat berpengaruh kepada masyarakat pemakai bahasa. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa penggunaan bahasa di ruang publik sudah benar. Namun, pada kenyataannya masih banyak dijumpai penggunaan bahasa yang tidak baik dan tidak benar. Atas dasar anggapan bahasa di ruang publik sudah baik dan benar, masyarakat akan mudah meniru, mengidolakan, dan yang paling rendah tingkat dampaknya adalah menanamnya pada otak bawah sadarnya (teori psikologis). Oleh karena sangat besar dampak bahasa ruang publik, pemerintah sudah sewajarnya melakukan edukasi publik sebagai bagian dari pembinaan berbahasa Indonesia yang benar dengan meluruskan hal-hal yang kurang bahkan tidak tepat. Maksud dari pembinaan tersebut adalah agar masyarakat Indonesia mendapat pemahaman yang benar dan segera memperbaiki wajah ruang publiknya melalui penyempurnaan penggunaan bahasa di ruang publik.

Pengutamaan bahasa negara di ruang publik tidak berarti bahwa pemerintah melarang penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing. Hal tersebut sejalan dengan Trigatra Bangun Bahasa yang dicanangkan lembaga resmi bahasa di Indonesia (Badan Bahasa) yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Di sisi lain, pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur kebijakan bahasa masing-masing sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Tindak lanjut nyata atas kebijakan tersebut adalah beberapa daerah di Indonesia telah melakukan upaya revitalisasi bahasa dan kebudayaan yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa, aksara, dan sastra lokal. Sebagai contoh, pelestarian dan pengembangan bahasa Jawa oleh Pemerintah Kota Surakarta (melalui Perwali Nomor 3 Tahun 2008), oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah (melalui Pergub Nomor 55 Tahun 2014), dan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar (melalui Perda Nomor 2 Tahun 2013). Selain itu, adanya revitalisasi bahasa dan aksara Bali melalui Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Bahasa dan Aksara Bali di Ruang Publik.

Sejumlah kajian mengenai vitalitas bahasa dan aksara lokal di sejumlah daerah telah dikaji oleh sejumlah peneliti, misalnya dalam konteks Yogyakarta serta Bandung dan Pekanbaru (Erikha, 2021). Upaya pemertahanan bahasa dan aksara daerah tentunya merupakan hal positif yang perlu diapresiasi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan tersebut perlu diperhatikan kembali agar tetap sesuai dengan ketentuan dasar



pengutamaan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Salah satu substansi yang perlu dicermati adalah isi Bab IV Pasal 6 pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 sebagai berikut.

Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf latin dalam penulisan nama-nama tempat: tempat persembahyangan umat Hindu, lembaga adat, prasasti peresmian gedung, lembaga pemerintahan, lembaga swasta, jalan, sarana pariwisata, dan fasilitas umum lainnya.

Kenyataan tersebut jelas bertolak belakang dengan politik bahasa nasional yang memprioritaskan bahasa Indonesia yang dikukuhkan secara konstitusi hingga kebijakan politik bahasa nasional. Implementasi kebijakan bahasa pada situasi lanskap linguistik di suatu daerah tidak selalu berjalan dengan baik. Di sisi lain, terdapat relasi yang saling berhubungan antara pemerintah sebagai penentu kebijakan dan masyarakat. Erikha (2018) mengkaji penyematan bahasa Jawa pada sejumlah jalan di Kota Yogyakarta dalam revitalisasi filosofi *Sangkan Paraning Dumadi* yang dapat dikatakan cukup sukses, meskipun terdapat juga sedikit penolakan dari masyarakat. Di Jakarta, belum lama ini, Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyikapi perubahan 22 nama jalan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Nama jalan yang baru tersebut diresmikan pada 20 Juli 2022 dengan menggunakan nama para tokoh Betawi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu strategi dan konsep yang matang sebelum pemerintah mengimplementasikan sebuah kebijakan, khususnya dalam hal ini adalah kebijakan bahasa agar upaya yang dilakukan berhasil dan minim akan penolakan.

Ditetapkannya kebijakan tentang upaya pelestarian bahasa daerah oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia tidak mengurangi esensi pengutamaan bahasa negara. Tumpang tindih yang terjadi atas penegakan peraturan-peraturan tersebut perlu disiasati dengan berbagai strategi. Penghormatan dan pelestarian bahasa daerah tetap dilaksanakan dengan tetap mengutamakan bahasa negara. Perencanaan dan strategi perencanaan bahasa. Strategi akan menentukan dua hal, yaitu (1) sarana atau alat, media dan (2) kegiatan apa yang akan digunakan untuk melaksanakan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Salah satu ‘alat’ yang telah direalisasikan oleh pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pelaksanaan Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara yang menyepakati rekomendasi kebijakan untuk mengangkat kembali kesadaran berbahasa negara yang ideal di ruang publik. Adapun contoh kegiatan yang menjadi strategi perencanaan bahasa dapat dilakukan melalui kompetisi, penghargaan, dan sebagainya. Strategi tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan kawasan praktik baik pengutamaan bahasa negara di ruang publik kawasan IKN.

Kebijakan bahasa nasional juga mengakomodasi kehadiran bahasa asing sebagai pendukung bahasa negara. Hasil Seminar Politik Bahasa Nasional (1975) menyatakan bahwa bahasa asing (Inggris, Prancis, Jerman, Belanda) diajarkan di lembaga pendidikan dan tidak berkompetisi dengan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa



nasional maupun bahasa negara, serta dengan bahasa daerah yang telah menjadi simbol budaya. Sementara itu, dalam konteks lain, penghormatan terhadap kehadiran bahasa asing juga ditunjukkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Pasal 44 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara reklame berkewajiban menyajikan naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan ketentuan apabila dalam naskah reklame mencantumkan bahasa asing maka pencantuman bahasa asing diletakkan di bagian bawah pada naskah reklame bahasa Indonesia.

Proyeksi Praktik Baik Pengutamaan Bahasa Negara di Kawasan IKN

Pembentukan kawasan praktik baik pengutamaan bahasa negara di wilayah IKN merupakan upaya pembinaan bahasa bagi masyarakat melalui pemberian teladan penggunaan bahasa yang baik sesuai dengan aturan dalam peraturan perundangan. Dalam aturan perundangan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 sudah jelas diatur bahwa bahasa Indonesia wajib diutamakan. Adapun bahasa lain—bahasa daerah dan bahasa asing memiliki kedudukan sebagai bahasa pendamping/pelengkap bahasa Indonesia. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat disertakan mengikuti bahasa Indonesia dengan tujuan-tujuan tertentu, misalnya pelestarian bahasa, revitalisasi bahasa, dan tujuan pendidikan.

Oleh karena pentingnya hal tersebut, pembentukan kawasan praktik baik pengutamaan bahasa negara di kawasan IKN harus didasarkan pada kajian lanskap linguistik yang kuat. Kajian tersebut akan memberikan gambaran, pemahaman, dan pengetahuan atas urgensi pengutamaan bahasa Indonesia. Upaya untuk mempertahankan kebudayaan khas Kalimantan, misalnya, dapat diakomodasi dengan menghadirkan unsur kebahasaan yang khas dan identik sebagai pendamping bahasa negara. Hal yang tidak kalah penting adalah pemahaman atas perincian dari lanskap linguistik itu sendiri. Misalnya, yang dimaksud dengan marka publik (*public sign*) mulai dari stiker yang ditulis tangan hingga papan reklame besar termasuk juga apakah marka tersebut statis atau bergerak, misalnya marka pada gerobak dan kendaraan. Lingkup LL kemudian semakin diperluas ke media cetak, situs, dan blog serta publikasi akademik. Secara umum, dapat dikatakan bahwa cakupan marka dalam LL ialah marka yang di atasnya terdapat tulisan (baik cetak maupun elektronik) dan atau simbol. Marka tersebut dapat berukuran kecil hingga besar yang dapat dengan mudah dilihat atau dibaca dan terletak di daerah perkotaan.

Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah menetapkan pedoman pengutamaan bahasa negara di ruang publik melalui Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022—2024. Dalam petunjuk teknis tersebut, penggunaan bahasa di ruang-ruang publik yang bisa diakses oleh masyarakat umum yang terdapat pada lembaga publik disebut sebagai wajah bahasa lembaga. Wajah bahasa lembaga terletak di area yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dalam memenuhi kepentingan atau wilayah yang bebas digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh layanan lembaga/kawasan. Wajah bahasa lembaga mengacu pada penggunaan bahasa tulis di ruang-ruang yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam melakukan keperluan atau



kepentingannya. Wajah bahasa tersebut diklasifikasikan menjadi tujuh objek, meliputi: 1) tulisan nama lembaga dan gedung, 2) tulisan nama sarana umum, 3) tulisan nama ruang pertemuan, 4) tulisan nama produk barang/jasa, 5) tulisan nama jabatan, 6) tulisan penunjuk arah atau rambu umum, dan 7) tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya.

Contoh penerapan konsep pengutamaan bahasa negara di ruang publik adalah sebagai berikut.



Gambar 3. Praktik Baik Pengutamaan Bahasa Negara di Kawasan Kota Tua, Jakarta

Dalam objek-objek bahasa tersebut, bahasa Indonesia selalu diutamakan, yaitu diposisikan di atas bahasa asing. Bahasa asing—bahasa Inggris—dalam objek tersebut hadir sebagai bahasa pendukung. Penulisan bahasa asing dalam objek tersebut juga sesuai dengan kaidah penulisan bahasa asing: dicetak miring. Konsep pengutamaan bahasa negara berprinsip bahwa bahasa Indonesia ditulis menggunakan ukuran huruf yang lebih besar dibandingkan dengan bahasa pendukungnya. Pemosisian tersebut berkaitan dengan prinsip visibilitas dalam lanskap linguistik, yaitu untuk mendukung pemenuhan fungsi informasi. Penempatan bahasa dengan visibilitas tinggi akan memudahkan pengguna bahasa untuk memahami makna dan informasi yang dimaksud.

Praktik baik pengutamaan bahasa negara di beberapa kawasan di DKI Jakarta tersebut dapat menjadi dimensi refleksi untuk pemroyeksian lanskap linguistik di kawasan IKN. Pembentukan kawasan praktik baik pengutamaan bahasa negara di



wilayah IKN diharapkan dapat memperkuat jati diri keindonesiaan melalui penggunaan bahasa tulis yang dapat dilihat secara visual di ruang publik. Penggunaan bahasa di ruang publik tersebut menunjukkan bagaimana jati diri serta kompetensi pemakai bahasa. Praktik baik pengutamaan bahasa negara yang diproyeksikan di wilayah IKN akan menunjukkan kekuatan identitas nasional bangsa Indonesia melalui bahasa. Oleh karena itu, diperlukan sikap positif dalam berbahasa, yaitu tertib berbahasa sesuai dengan ketentuan hukum dan kaidah kebahasaan. Dalam rangka mewujudkan kawasan IKN yang mengutamakan bahasa negara, perlu dibangun kerja sama dan sinergisitas yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kawasan IKN yang tertib berbahasa diharapkan dapat menjadi kawasan percontohan yang mencerminkan jati diri keindonesiaan.

SIMPULAN

Pembangunan wilayah IKN yang tertib berbahasa seharusnya menjadi salah satu hal pokok pembangunan IKN yang beridentitas nasional yang salah satu wujudnya adalah penggunaan bahasa negara di ruang publik. Symbolisme bangunan istana berbentuk Garuda yang mencerminkan salah satu lambang negara akan tidak berarti jika ruang publik IKN baru tidak mencerminkan kedaulatan bahasa Indonesia. Selagi masih dalam proses pembangunan dan pemerintah memegang penuh proses pembangunan tersebut, pembangunan IKN baru yang beridentitas dan berjati diri keindonesiaan dalam bentuk pengutamaan bahasa Indonesia adalah langkah cerdas menguatkan kebanggaan nasional yang pada akhirnya dapat mendukung kesatuan bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah sepantasnya pembangunan IKN baru melibatkan pemangku kepentingan bahasa Indonesia (Badan Bahasa), praktisi bahasa, dan peneliti-peneliti bahasa sehingga pembangunan IKN baru tidak sekadar pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga pembangunan identitas, jati diri, dan kebanggaan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Athwary, A. A. H. (2022). Linguistic Landscape in Najran: A Sociolinguistic Approach. *Theory and Practice in Language Studies*, 12(12), 2559–2567. <https://doi.org/10.17507/tpls.1212.11>
- Amin, A. & Zarrinabadi, N. (2022). The Representation of Unity, Social Sustainability, and National Identity in the Linguistic Landscape of Doha, Qatar. *Sustainability (Switzerland)*, 14(22), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su142215018>
- Amos, H. W. (2017). Regional Language Vitality in the Linguistic Landscape: Hidden Hierarchies on Street Signs in Toulouse. *International Journal of Multilingualism*, 14(2), 93–108. <https://doi.org/10.1080/14790718.2015.1103244>
- Anestos, K., Gargalianos, D., & Thamnopoulos, Y. (2016). Exploring the Issue of Naming Rights of Public Sports Facilities in Greece. *Journal of Facilities Management*, 14(2), 125–138. <https://doi.org/10.1108/JFM-06-2015-0019>
- Arditama, E. (2016). Mengkaji Ruang Publik dari Perspektif Kuasa: Fenomena Kemenangan Aktor Hegemonik Melalui Dominasi Budaya. *Politik Indonesia:*



- Indonesian Political Science Review*, 1(1), 69–86.
<https://doi.org/10.15294/JPI.V1I1.9181>
- Astuti, T. (2019). Sikap dan Pemertahanan Bahasa Indonesia di Kalangan Akademisi (Tinjauan Deskriptif terhadap Fenomena Pemakaian Bahasa Indonesia). *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 154–163.
- Ben-Rafael, E., Shohamy, E., & Barni, M. (2010). Introduction: An Approach to an ‘Ordered Disorder.’ In E. Shohamy, E. Ben-Rafael & M. Barni (Ed.), *Linguistic Landscape in the City* (pp. xi-xxviii). Bristol, Blue Ridge Summit: Multilingual Matters. <https://doi.org/10.21832/9781847692993-002>
- Blommaert, J. (2013). Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity, Bristol, Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, 2013. <https://doi.org/10.21832/9781783090419>
- Cohn, A. C. & Ravindranath, M. (2014). Local Languages in Indonesia: Language Maintenance or Language Shift? *Linguistik Indonesia*, 32(2), 131–148. <https://doi.org/10.26499/li.v32i2.22>
- Dewantara, I. P. M., Suandi, I. N., Putrayasa, I. B., & Rasna, I. W. (2019). Membangun Sikap Bahasa Positif terhadap Bahasa Indonesia. *Jurnal Penelitian Ddn Pengembangan Sains dan Humaniora*, 2(2), 73–78. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v2i2.15974>
- Duizenberg, M. R. (Max). (2020). Linguistics Landscape: a Cross Culture Perspective. *Linguistics and Culture Review*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.37028/LINGCURE.V4N1.17>
- Erikha, F. (2018). Konsep Lanskap Linguistik pada Papan Nama Jalan Kerajaan (Râjamârga): Studi Kasus Kota Yogyakarta. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 8(1), 38–52. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v8i1.231>
- Erikha, F. (2021). Application of the Concept of Critical Toponymies To Street Name Changes in Bandung, Yogyakarta, and Surabaya. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 11(1), 25–41. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v11i1.373>
- Fitriati, S. W. & Rata, E. (2020). Language, Globalisation, and National Identity: A Study of English-Medium Policy and Practice in Indonesia. *Journal of Language, Identity, and Education*, 20(6), 1–14. <https://doi.org/10.1080/15348458.2020.1777865>
- Goebel, Z. (2014). Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity. *Sociolinguistica*, 28(1), 213–215. <https://doi.org/10.1515/SOCI-2014-0016>
- Gorter, D. (2013). Linguistic Landscape: A new Approach to Multilingualism World. *Annual Review of Applied Linguistics*, 33, 190–212.
- Hariati, & Saputri, A. S. (2022). Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Indonesia. *Journal of Government and Politics*, 4(1), 16–28. <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.8218>
- Hendrastuti, R. (2015). Variasi Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik Kota Surakarta. *Kandai*, 11(1), 32–33.
- Ibrahim, G. A. & Mayani, L. A. (2018). Perencanaan Bahasa di Indonesia Berbasis Triglosia. *Linguistik Indonesia*, 36(2), 107–116.



- <https://doi.org/10.26499/li.v36i2.77>
- Itaristanti. (2020). Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik pada Nama Tempat Usaha di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. *Indonesian Language Education and Literature*, 5(2), 223–236. <https://doi.org/10.24235/ileal.v5i2.6427>
- Jing, F. (2017). Investigating Intentionality of Linguistic Landscapes from the Multilingual Commercial Signs. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 3(5), 42–52.
- Landry, R. & Bourhis, R. Y. (1997). Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study. *Journal of Language and Social Psychology*, 16(1), 23–49. <https://doi.org/10.1177/0261927X970161002>
- Lauder, A. F. & Lauder, M. R. M. T. (2015). Ubiquitous place names: Standardization and study in Indonesia. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 16(2), 383–410. <https://doi.org/10.17510/wacana.v16i2.383>
- Léglise, I. & Migge, B. (2021). Language and Identity Construction on the French Guiana-Suriname Border. *International Journal of Multilingualism*, 18(1), 90–104. <https://doi.org/10.1080/14790718.2019.1633332>
- Lu, S., Li, G., & Xu, M. (2020). The linguistic landscape in rural destinations: A case study of Hongcun Village in China. *Tourism Management*, 77(1), 10400. <https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2019.104005>
- Melati, S. (2018). Perencanaan Bahasa di Indonesia dan Fungsinya sebagai Pemersatu Keberagaman Bangsa. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua*, 3(2), 46–54. <https://doi.org/10.21107/metalingua.v3i2.7040>
- Mitits, L. (2022). The Covid-19 Pandemic Within Global Linguistic Landscape: A Comparative Case Study the Covid-19 Pandemic Within A Global Linguistic Landscape: A Comparative Case Study Lydia Mitits the Covid-19 Pandemic Within A Global Linguistic Landscape: A Comparative . *Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics*, 3(2021), 176–201.
- Moeloeng, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nash, J. (2016). Is linguistic landscape necessary? *Landscape Research*, 41(3), 380–384. <https://doi.org/10.1080/01426397.2016.1152356>
- Nida, F. (2021). Sosialisasi Istilah Bidang Teknologi dalam Bahasa Indonesia Baku dan Penerapannya di Ruang Publik. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.35970/madani.v3i1.393>
- Peck, A. & Banda, F. (2014). Observatory's Linguistic Landscape: Semiotic Appropriation and the Reinvention of Space. *Social Semiotics*, 24(3), 302–323. <https://doi.org/10.1080/10350330.2014.896651>
- Puzey, G. (2016). *Linguistic Landscapes*. In C. Hough (Ed.), *The Oxford Handbook of Names and Naming* (pp. 395–411). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199656431.013.16>
- Ridlo, M., Amalia, R. M., & Rahmatunnisa, M. (2019). Situasi Bahasa Sebagai Alat untuk Perencanaan Bahasa Nasional. *Responsive*, 1(3), 86–89. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i3.20743>



- Ridwan, M. (2018). National and Official Language: The Long Journey of Indonesian Language. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 1(2), 72–78. <https://doi.org/10.33258/birci.v1i2.14>
- Rochmansyah, B. N., Mulyaningsih, I., & Itaristanti. (2022). Analisis Kesalahan Berbahasa pada Surat Edaran Resmi. *Litera*, 21(1), 81–93. <https://doi.org/10.21831/ltr.v21i1.40115>
- Sahril, Harahap, S. Z., & Hermanto, A. B. (2019). Eskalasi Bahasa Indoglish dalam Ruang Publik Media Sosial. *Medan Makna*, 17(2), 195–208. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v2i2.20>
- Sneddon, J. (2003). *The Indonesian language : its history and role in modern society*. Sydney: UNSW Press.
- Spolsky, B. (2004). *Language Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sudaryanto, Zultiyanti, Yumartati, A., Saputri, F. M., & Nurmalitasari, N. (2019). Aplikasinya dalam Konteks Bahasa Indonesia. *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia*, 3(2), 66–75.
- Sudrama, K. & Yadnya, I. B. P. (2015). Dilema Multilingualisme dan Implikasinya terhadap Perencanaan Bahasa. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(1), 94–107. <https://doi.org/10.22225/jr.1.1.15.94-107>
- Symaco, L. P. (2017). Education, Language Policy and Language Use in the Philippines. *Language Problems and Language Planning*, 41(1), 87–102. <https://doi.org/10.1075/lplp.41.1.05sym>
- Taylor-Leech, K. J. (2012). Language Choice as an Index of Identity: Linguistic Landscape in Dili, Timor-Leste. *International Journal of Multilingualism*, 9(1), 15–34. <https://doi.org/10.1080/14790718.2011.583654>
- Tran, L. T. P. & Hoang, T. N. T. (2022). Semiotic Influences of Linguistic Landscapes in the Little Japan Towns in Ho Chi Minh City-Vietnam. *Eurasian Journal of Educational Research*, 99(99), 1–25.
- Wardani, D., Bahri, R., & Razali. (2020). Sikap Bahasa Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Geumpang terhadap Bahasa Indonesia. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(4), 623–635. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/8101>
- Wulansari, D. W. (2020). Linguistik Lanskap di Bali : Tanda Multilingual dalam Papan Nama Ruang Publik. *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 3(2), 420–429. <https://doi.org/10.24176/kredo.v3i2.4600>
- Yamin, M., Setiawan, S., Anam, S., & Kurnia, F. D. (2020). Critical Thinking in Language Planning for Local Languages Maintenance: Evidence from Banjarese, Indonesia. *Language Related Research*, 11(5), 179–199. <https://doi.org/10.29252/lrr.11.5.179>
- Yan, X. (2019). A Study of Language Choices in the Linguistic Landscape of Macao's Heritage and Gaming Tourism. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 40(3), 198–217. <https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1498853>